



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)
Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : 700/365/Itda/2022

Singaraja, 30 Mei 2022

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Reviu Atas Penilaian
tingkat unit kerja

Kepada

Yth. Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi
Daerah
di -

Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Reviu dilaksanakan terhadap komponen pengungkit yang terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek *reform*. Aspek pemenuhan dan aspek *reform* masing-masing terdiri atas 8 sub komponen yang telah dilakukan penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja.

Reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, menunjukkan capaian hasil monitoring dan akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Hasil Reviu yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 36,30. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, memperoleh nilai **sebesar 16,7**.
3. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen Pengungkit yang telah di verifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

Penilaian		Bobot	Nilai
A	PENGUNGKIT		
	I. PEMENUHAN	14,60	7,46
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,57
	2 DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	1,00
	3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	1,27
	4 PENATAAN TATALAKSANA	1,00	0,75
	5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	0,86

	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	0,50
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	0,34
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	1,17
	II.	REFORM	21,70	8,71
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	1,45
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	1,00
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	0,00
	4	PENATAAN TATALAKSANA	3,75	1,00
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	1,00
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,25
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	1,95	0,6
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	0,41

4. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program Reformasi Birokrasi adalah:
- a. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada unit kerja wajib dilakukan oleh **asesor (Sekretaris) beserta tim asesor**, kesepakatan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dibuktikan Berita Acara konsensus yang ditandatangani oleh asesor dan tim asesor.
 - b. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik atau setiap bulan lalu dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.
 - c. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.
 - d. Perlu dibentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada Unit Kerja, dimana tim UPG ini nantinya akan bertugas dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi pada unit kerja dan melaporkan hasilnya secara periodik (setiap bulanan) ke Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
 - e. Melakukan penilaian risiko unit kerja dan melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
 - f. Melaksanakan evaluasi atas Penerapan SPI.
 - g. Mensosialisasikan Whistle Blowing System kepada seluruh pegawai.
 - h. Mensosialisasikan Penanganan Benturan Kepentingan.
 - i. Melakukan penancangan Pembangunan zona integritas level unit kerja.
 - j. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima.
 - k. Menerapkan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
 - l. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan minimal dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Demikian disampaikan hasil Reviu atas Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Instansi Pemerintah Kabupaten ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,

I Putu Karuna, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri PANRB di Jakarta;
2. Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Sekertaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Arsip.